



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**



LAKIP

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2022

**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang dicurahkan-Nya, sehingga tersusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa sajian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari hasil yang diharapkan namun setidaknya sudah dapat menggambarkan kondisi minimal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dari maksud dibuatnya laporan ini.

Atas kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam membantu, mengarahkan dan merampungkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin..

Tilamuta, Januari 2022

**KAPALA DINAS**
DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
Dra. MONRU MOPANGGA
NID. 19660930 199702 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	3
1.3. Arah Kebijakan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8
2.2. Tujuan dan Sasaran	8
2.3. Rencana Kinerja Tahunan	9
2.4. Indikator Kinerja Utama	10
2.5. Perjanjian Kinerja	11
2.6. Keterkaitan Rencana Kerja dengan RPJMD	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Evaluasi Kinerja Organisasi	15
3.2.1. Evaluasi Kinerja Berdasarkan IKU	15
3.2.2. Analisa Cakupan Kinerja Berdasarkan PK	18
3.2.3. Permasalahan dan Hambatan	20
3.2.4. Strategi Pemecahan Masalah	20
3.2.5. Realisasi Anggaran	21
3.3. Analisis Efisiensi Atas Sumber Daya	25
BAB IV PENUTUP	32
4.1. Simpulan	32
4.2. Saran	32

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo dalam Tahun 2022 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022. Ketiga sasaran strategis tersebut dicapai dalam bentuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.374.493.019,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.208.480.383,- atau sebesar 95,08%

Secara umum kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022 yang diukur dari pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan pada Tahun 2022 dinilai berhasil, ditunjukkan dengan rencana kinerja atau indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai.

Sedangkan permasalahan mendasar yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Tahun 2022 adalah untuk Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa masih gabung dalam satu OPD sehingga mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, mengingat Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Urusan Wajib sehingga diharapkan pelayanan program sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hakekat penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengimplementasikan bahwa Kepala Daerah sebagai penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui pola dasar yang tertuang dalam kerangka arah, tujuan dan sasaran kebijakan yang dibantu oleh perangkat daerah sebagai pelaksana operasional, wajib menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang :

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah suatu media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah. LAKIP dapat bermanfaat antara lain untuk mendorong terselenggarakannya tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance), menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana hanya menangani urusan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, berkewajiban pula menyusun LAKIP untuk Periode Tahun Anggaran 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di Bidang Sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dalam lingkup tugas dinas;
4. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa serta memberikan laporan dan penyuluhan;
6. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo merupakan salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo, sebagai salah satu Organisasi/Perangkat Daerah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Tugas

Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di Bidang Sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dalam lingkup tugas dinas;
4. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa serta memberikan laporan dan penyuluhan;
6. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan fakir miskin;
4. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Keadaan dan Kekuatan Pegawai

Adapun keadaan Pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo menurut Golongan/Ruang, Pendidikan Normal, Tingkat Esselonisasi dan Diklat Struktural digambarkan sebagai berikut :

SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Golongan IV	2	2	4	
Golongan III	9	12	21	

Golongan II	4	3	7	
Golongan I	-	-	-	
Jumlah	15	17	32	

SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal

Pendidikan Formal	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Setingkat Doktor (S3)	-	-	-	
Setingkat Magister (S2)	1	1	2	
Setingkat Sarjana (S1)	7	11	18	
Setingkat Diploma	2	2	4	
Setingkat SLTA	5	3	8	
Setingkat SLTP	-	-	-	
Setingkat SD	-	-	-	
Jumlah	15	17	32	

SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Esselonisasi

Tingkat Esselonisasi	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Eselon II b	-	1	1	
Eselon III a	1	-	1	
Eselon III b	1	2	3	
Eselon IV a	1	1	2	
Pejabat Fungsional	4	5	9	

Staf	8	8	16	
Tenaga Penunjang Kegiatan	13	12	25	
Jumlah	28	29	57	

SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural

Diklat Struktural	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Diklat Lemhanas	0	0	0	
Diklat PIM I	-	-	-	
Diklat PIM II	1	-	1	
Diklat PIM III	1	2	3	
Diklat PIM IV	2	1	3	
Diklat Prajabatan	12	13	25	
Jumlah	16	16	32	

b. Keadaan dan Kekuatan Pegawai

Perlengkapan atau Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, untuk saat ini masih bertempat di Eks Kantor Dinas Lingkungan Hidup Jalan Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta.

Selain itu untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo belum memiliki Aset dan Perlengkapan Kantor yang memadai.

1.3 ARAH KEBIJAKAN

Dari uraian Tujuan dan Sararan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dan berpedoman dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diambil kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Kehidupan Sosial yang Berkualitas dan Komprehensif.
2. Mengedepankan Peran Gender dan Generasi Muda dalam Pembangunan Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)
3. Peningkatan Sistem Pelayanan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah.
4. Pengembangan Produktifitas Berbasis Rumah Tangga sasaran (RTS).
5. Perluasan Akses Berusaha bagi Lembaga Ekonomi di Perdesaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo

Arah pengembangan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan kepada rumusan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo yakni **“Kabupaten Boalemo yang Aman, Cerdas, Sejahtera dalam Suasana yang Religius Tahun 2022”** dengan misi kesatu dan ketiga **“Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera.”**

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo telah menetapkan visi dan misi untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal dalam bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan Desa. Visi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian Masyarakat Perdesaan”**

Untuk mencapai Visi tersebut, dijabarkan beberapa Misi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo sesuai dengan fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo yaitu:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Perdesaan.
2. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Miskin dan Perdesaan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai misi yang dikemukakan diatas serta dengan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan organisasi, maka tujuan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo.

3. Mengembangkan Perekonomian Perdesaan

Adapun sasaran kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diarahkan pada :

1. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
2. meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik
3. berkembangnya ekonomi desa

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Sekretariat Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %

Tabel 2.2 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	45 %

Tabel 2.3 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase KK yang mendapat perlindungan sosial berupa pemberian Bahan Pangan	100 %
		Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	80 %

Tabel 2.4 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Berkembangnya Ekonomi Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	82 Desa
		Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	80 %
		Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat	80 %

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator yang digunakan harus selaras antar tingkatan unit organisasi, dan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat Indikator Kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik.

Tabel 2.5 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2022

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Terselesaikan Permasalahan Kesejahteraan Sosial
2	Berkembangnya Ekonomi Desa	Persentase Desa yang Maju (Mandiri)

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan Anggaran atau DPA. Adapun perjanjian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase KK yang mendapat perlindungan sosial berupa pemberian bahan pangan	100 %
		Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	45 %
		Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	80 %
2	Berkembangnya Ekonomi Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	82 Desa
		Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	80 %
		Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat	80 %
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %

2.6 Keterkaitan Rencana Kerja dengan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 merupakan jawaban dari Visi dan Misi Kepala Daerah

terpilih, didalamnya berisi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kabupaten Boalemo pada Tahun 2018.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan merupakan prioritas utama dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Boalemo, sebagaimana tercermin dalam Visi Kabupaten Boalemo **“Kabupaten Boalemo yang Damai, Sejahtera dalam Suasana yang Religius Tahun 2022”**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaksanakan 2 (dua) misi yaitu misi kesatu dan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu: **“Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera”**. Tujuan yang hendak dicapai adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan memberdayakan masyarakat agar dapat hidup produktif dan mandiri.

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah Peningkatan Kesejahteraan Hidup Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan arah kebijakan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya teknologi/buatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat boalemo secara lahir dan batin.

Program yang dilaksanakan untuk urusan sosial dasar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah dimuat pula dalam Rencana Kerja Tahunan 2022 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Administrasi Pemerintahan Desa
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan tingkat pencapaian atas kinerja selama Tahun 2022 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Pengukuran Kinerja menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan sasaran untuk mengukur indikator keberhasilan. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Organisasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja Tahun 2022

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
	≥ 91	Sangat Baik
	75,1 – 90,0	Tinggi
	65,1 – 75,0	Sedang
	50,1 – 65,0	Rendah
	$\leq 50,0$	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja, untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut pada Tahun 2022 terdapat 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Kasubag dan 9 (sembilan) Kelompok Jabatan Fungsional. Dari hasil evaluasi dan

pengukuran kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis dan indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan berdasarkan bidang yang merupakan pemegang program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo dengan Rata-rata Pencapaian Kinerja mencapai 100% bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target dengan rincian capaian masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Cakupan Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	TARGET
1	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase KK yang mendapat perlindungan sosial berupa pemberian bahan pangan	132,60 %	100 %
		Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	104 %	45 %
		Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	261 %	45 %
		Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	100 %	80 %
2	Berkembangnya Ekonomi Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pendirian BUMDes dan menyertakan modal dari dana desa	82 Desa	82 Desa
		Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	100 %	80 %
		Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat	100 %	80 %
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %	100 %

Dari data yang tersaji pada table 3.2 diatas terlihat bahwa dari 8 (delapan) Indikator Sasaran berdasarkan realisasi laporan kinerja, 2 indikator sasaran realisasinya mencapai target dan 6 indikator sasaran melebihi target.

Berdasarkan tabel tersebut diatas bila dibandingkan dengan sumber daya yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat efisiensi hal ini dapat ditinjau atau dianalisis dari Dinas yang memiliki 2 (dua) bidang urusan yakni urusan bidang sosial dan urusan bidang pemberdayaan masyarakat, yang seharusnya sesuai tipe untuk urusan bidang sosial tipe A yang seharusnya memiliki 4 bidang untuk eselon III dan 8 seksi untuk eselon IV namun kenyataannya untuk realisasi laporan kinerja ini hanya dilaksanakan oleh 2 eselon III dan 5 eselon IV, dalam hal ini untuk urusan bidang sosial bisa mengefisiensikan 5 sumber daya.

Sedangkan untuk urusan bidang pemberdayaan masyarakat yang seharusnya sesuai tipe untuk urusan bidang pemberdayaan masyarakat tipe B yang seharusnya memiliki 3 bidang untuk eselon III dan 6 seksi untuk eselon IV namun kenyataannya untuk realisasi laporan kinerja ini hanya dilaksanakan oleh 1 eselon III dan 3 eselon IV, dalam hal ini untuk urusan bidang pemberdayaan masyarakat bisa mengefisinsikan 5 sumber daya.

3.2 Evaluasi Kinerja Organisasi

3.2.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Evaluasi ini menyajikan Perbandingan Capaian antara Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Realisasi Kinerja dengan Target yang ditetapkan.

Tabel 3.3 : Indikator Capaian Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Capaian Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2022.

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2022	REAL. KINERJA
1	Persentase KK yang mendapat perlindungan sosial berupa pemberian bahan pangan	165 %	132,60 %	100 %	132,60 %

2	Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	163 %	104 %	45 %	104 %
3	Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	295 %	261 %	45 %	261 %
4	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	143 %	100 %	80 %	100 %
5	Jumlah desa yang di fasilitasi pendirian BUMDes dan menyertakan modal dari dana desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa
6	Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	1,32%	100 %	80 %	100 %
7	Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat	133 %	100 %	80 %	100 %
8	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan data yang tersaji pada table 3.3 diatas terlihat bahwa dari 8 (delapan) Indikator Sasaran berdasarkan realisasi kinerja ada 6 (enam) indikator yang mengalami peningkatan atau melebihi target sedangkan 2 (dua) indikator lainnya memenuhi target dari tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang mendapat Bantuan Sosial di bagi dengan Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang seharusnya mendapat Bantuan Sosial dikali 100%, dengan Target Tahun 2022 sejumlah 143.000 Jiwa, realisasinya melebihi target yaitu 147.941 Jiwa. Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator tersebut diatas adalah pemberian bantuan perlindungan jaminan sosial kesehatan masyarakat.

2. Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang mendapat Bantuan Sosial di bagi dengan Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang seharusnya mendapat Bantuan Sosial dikali 100%, dengan target 4.000 jiwa pada Tahun 2022, realisasinya melebihi target yaitu 10.444 jiwa atau 261%. Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator tersebut diatas adalah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Persentase Kepala Keluarga yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan dibagi dengan Jumlah KK yang seharusnya mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan dikali 100%, pada tahun 2022 realisasinya melebihi target yakni 17.313 KK atau 132,60%.

4. Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dibagi dengan Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat yang seharusnya Aktif dikali 100%, realisasinya mencapai 100% melebihi dari yang ditargetkan yaitu 80%.

5. Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Organisasi yang Beranggotakan Gender dibagi dengan Jumlah Organisasi yang Seharusnya Beranggotakan Gender dikali 100%. Dengan target pada tahun 2022 adalah 80%, realisasinya melebihi 100%.

6. Jumlah desa yang di fasilitasi pendirian BUMDes dan menyertakan modal dari dana desa.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Desa yang Mendirikan BUMDes sesuai target. Dengan target 82 Desa, realisasinya mencapai target yakni 82 Desa.

7. Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa.

Indikator ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan di bidang pemerintahan desa dengan target pada Tahun 2022 adalah 80%, realisasinya melebihi yakni 100%.

8. Persentase Administrasi yang Tertata dengan Baik

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Administrasi yang Tertata dengan Baik dibagi dengan Jumlah Administrasi yang Seharusnya Tertata dengan Baik dikali 100%.

Tahun 2022 Indikator ini realisasinya masih sama dengan Tahun 2021 mencapai Target 100%.

3.2.2 Analisa Cakupan Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan cakupan Tahun 2021 dan Target 2022.

Analisa Cakupan Kinerja ini menyajikan cakupan yang telah dicapai pada Tahun 2022 dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada Tahun 2021, sehingga diketahui kinerja yang mengalami peningkatan dan indikator yang tidak mengalami peningkatan cakupan kinerja sehingga dapat ditentukan langkah-langkah rekomendasi perbaikan.

Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja berdasarkan capaian Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target 2022	Capaian Kinerja		Analisa Tercapai Tidaknya Indikator Kinerja
			2021	2022	
	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	65,18 %	104 %	Indikator ini menunjukkan capaian kinerja Tahun 2022 melebihi capaian kinerja Tahun 2021

		Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	118 %	261 %	Indikator ini menunjukkan capaian kinerja Tahun 2022 melebihi capaian kinerja Tahun 2021
		Persentase KK yang mendapat perlindungan sosial berupa pemberian bahan pangan	99,20 %	132,60 %	Indikator ini menunjukkan capaian kinerja Tahun 2022 melebihi capaian kinerja Tahun 2021
		Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	100 %	100 %	Capaian Indikator Tahun 2022 sama dengan capaian indikator Tahun 2021
	Berkembangnya Ekonomi Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pendirian BUMDes dan menyertakan modal dari dana desa	82 Desa	82 Desa	Untuk indikator ini capaiannya sudah mencapai target 100% sejak Tahun kedua Renstra Tahun 2018
		Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	1,32 %	100 %	Indikator ini menunjukkan capaian kinerja Tahun 2022 melebihi capaian kinerja Tahun 2021
		Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat	100 %	100 %	Capaian Indikator Tahun 2022 sama dengan capaian indikator Tahun 2021

	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Presentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %	100 %	Capaian Indikator Tahun 2022 sama dengan capaian indikator Tahun 2021
--	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------	-------	-----------------------------------------------------------------------

Berdasarkan Table 3.4 tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 8 (delapan) Indikator Sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama menunjukkan rata-rata capaian kinerja di Tahun 2022 tercapai sesuai target, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, mencapai Target Kinerja untuk menunjang Indikator Kinerja Utama Daerah.

3.2.3 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sasaran menggunakan data yang estimasinya cukup tinggi jika dibandingkan dengan data riil, sehingga dalam penghitungan capaian data pencapaian kinerja masih dibawah target.
2. Belum tersusunnya rencana pencapaian target sesuai dengan kemampuan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan anggaran yang ada.

3.2.4 Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka ada beberapa alternatif dalam pemecahan masalah, antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya bagi pengelola program/kegiatan dalam menentukan indikator sasaran dalam setiap program/kegiatan.
2. Dalam penyusunan sasaran perlu mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
3. Perlu adanya penambahan anggaran untuk setiap program/kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan agar setiap indikator akan tercapai.
4. Dalam penentuan indikator sasaran agar tidak terlalu besar agar pada akhir tahun bisa tercapai.

3.2.5 Realisasi Anggaran

Belanja Daerah Kabupaten Boalemo disusun berdasarkan dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*out put*) dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022 persentase pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (belanja langsung) lebih diutamakan dari pada belanja tidak langsung.

Struktur belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022 terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Target Belanja Tidak Langsung Tahun 2022 sebesar **RP. 3.057.135.466,- (Tiga Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)**, dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar **Rp. 3.033.161.007,- (Tiga Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Rupiah)**, dengan hasil capaian sebesar **99,22 %**.

Tabel 3.2.6 : Capaian Kinerja Realisasi Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	BELANJA LANGSUNG	3.374.493.019,-	3.208.480.383,-	95,08
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	856.972.114,-	849.044.046,-	99,07
	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.646.000,-	287.287.900,-	99,88
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.646.000,-	287.287.900,-	99,88
	2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.326.114,-	561.756.146,-	98,67
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	569.326.114,-	561.756.146,-	98,67
2.	Program Pemberdayaan Sosial	197.255.745,-	126.700.000,-	64,23
	1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	197.255.745,-	126.700.000,-	64,23
	- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	197.255.745,-	126.700.000,-	64,23
3.	Program Rehabilitasi Sosial	854.837.395,-	823.741.700,-	96,36
	1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	81.956.575,-	80.221.700,-	97,88
	- Penyediaan Permakanan	75.666.575,-	74.621.700,-	98,62
	- Penyediaan Sandang	450.000,-	450.000,-	100
	- Penyediaan Alat Bantu	250.000,-	0,-	0

	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan - Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga 	<p style="text-align: right;">3.810.000,-</p> <p style="text-align: right;">445.000,-</p> <p style="text-align: right;">445.000,-</p>	<p style="text-align: right;">3.580.000,-</p> <p style="text-align: right;">400.000,-</p> <p style="text-align: right;">420.000,-</p>	<p style="text-align: right;">93,96</p> <p style="text-align: right;">89,89</p> <p style="text-align: right;">94,38</p>
	<p>2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Layanan Rujukan 	<p style="text-align: right;">445.000,-</p> <p style="text-align: right;">445.000,-</p> <p style="text-align: right;">772.880.820,-</p>	<p style="text-align: right;">350.000,-</p> <p style="text-align: right;">400.000,-</p> <p style="text-align: right;">743.520.000,-</p>	<p style="text-align: right;">78,65</p> <p style="text-align: right;">89,89</p> <p style="text-align: right;">96,20</p>
		772.880.820,-	743.520.000,-	96,20
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	173.247.820,-	172.600.000,-	99,63
	1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	173.247.820,-	172.600.000,-	99,63
	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 	<p style="text-align: right;">25.937.820,-</p> <p style="text-align: right;">147.310.000,-</p>	<p style="text-align: right;">25.820.000,-</p> <p style="text-align: right;">146.780.000,-</p>	<p style="text-align: right;">99,55</p> <p style="text-align: right;">99,64</p>
5.	Program Penanganan Bencana	43.434.750,-	40.512.456,-	93,27
	1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	43.434.750,-	40.512.456,-	93,27
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Makanan 	43.434.750,-	40.512.456,-	93,27
6.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.033.896.845,-	1.008.305.581,-	97,52
	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.033.896.845,-	1.008.305.581,-	97,52
	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 	<p style="text-align: right;">975.000,-</p> <p style="text-align: right;">173.717.820,-</p> <p style="text-align: right;">31.826.025,-</p>	<p style="text-align: right;">0,-</p> <p style="text-align: right;">166.428.000,-</p> <p style="text-align: right;">31.800.000,-</p>	<p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">95,80</p> <p style="text-align: right;">99,92</p>

	- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	27.278.000,-	27.210.000,-	99,75
	- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	800.100.000,-	782.867.581,-	97,85
7.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	214.848.350,-	187.576.600,-	87,31
	1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	214.848.350,-	187.576.600,-	87,31
	- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	214.848.350,-	187.576.600,-	87,31

Berdasarkan tabel diatas rata-rata program dan kegiatan yang di laksanakan pada Tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

3.3 Analisis Efisiensi Atas Sumber Daya

Dari 7 (tujuh) Program yang terdiri atas 8 (delapan) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo pada Tahun Anggaran 2022, dapat dianalisis efisiensi sumber daya yang dimanfaatkan dari total anggaran **Rp. 3.374.493.019,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Belas Rupiah), dengan Realiasi Rp. 3.208.480.383,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)** atau 95.08%, yang digunakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan seefisiensi mungkin hal ini dapat dilihat dari seluruh target capaiannya rata-rata mencapai 100%, sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 : Analisis efisiensi Atas Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (RP)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	856.972.114,-	849.044.046,-	99,07	Efisiensi
			20 Kali	20 Kali	100%	287.646.000,-	287.287.900,-	99,88	
			20 Kali	20 Kali	100%	287.646.000,-	287.287.900,-	99,88	
			7 Dok.	7 Dok.	100%	569.326.114,-	561.756.146,-	98,67	
			7 Dok.	7 Dok.	100%	569.326.114,-	561.756.146,-	98,67	

II	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	2.	Program Pemberdayaan Sosial	80%	100%	100%	197.255.745,-	126.700.000,-	64,23	Efisiensi
			1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4 Kali	4 Kali		197.255.745,-	126.700.000,-	64,23	
			- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kali	4 Kali		197.255.745,-	126.700.000,-	64,23	
		3.	Program Rehabilitasi Sosial	45%	104%	104%	854.837.395,-	823.741.700,-	96,36	Efisiensi
			1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	150 Orang	646 Orang		81.956.575,-	80.221.700,-	97,88	
			- Penyediaan	150	419 Orang		75.666.575,-	74.621.700,-	98,62	

			Permakanan	Orang						
			- Penyediaan Sandang	150	5 Orang		450.000,-	450.000,-	100	
			- Penyediaan Alat Bantu	150	205 Orang		250.000,-	0,-	0	
			- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	150	7 Orang		3.810.000,-	3.580.000,-	93,96	
			- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150	4 Orang		445.000,-	400.000,-	89,89	
			- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	150	2 Orang		445.000,-	420.000,-	94,38	
			- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	150	2 Orang		445.000,-	350.000,-	78,65	
			- Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	150	2 Orang		445.000,-	400.000,-	89,89	
			2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan	143.000	147.941 Jiwa		772.880.820,-	743.520.000,-	96,20	

			Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial - Pemberian Layanan Rujukan	143.000 Jiwa	147.941 Jiwa		772.880.820,-	743.520.000,-	96,20	
		4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100% 35 Kel. 13.028 KK	132,60% 9 Kel. 17.313 KK	132,60%	173.247.820,- 173.247.820,-	172.600.000,- 172.600.000,-	99,33 99,33	Efisiensi
				13.028 KK.	17.313 KK		25.937.820,-	25.820.000,-	99,55	
				35 Kel.	9 Kel.		147.310.000,-	146.780.000,-	99,64	
		5.	Program Penanganan Bencana 1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Penyediaan Makanan	45% 4.000 Jiwa	261% 10.444 Jiwa	261%	43.434.750,- 43.434.750,-	40.512.456,- 40.512.456,-	93,27 93,27	Efisiensi
				4.000 Jiwa	10.444 Jiwa		43.434.750,-	40.512.456,-	93,27	

III	Berkembangnya Ekonomi Desa	5. Program Administrasi Pemerintahan Desa	82 Desa	82 Desa	100%	1.033.896.845,-	1.008.305.581,-	97,52	Efisiensi
		1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%		1.033.896.845,-	1.008.305.581,-	97,52	
		- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	82 Desa	82 Desa		975.000,-	0,-	0	
		- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%	100%		173.717.820,-	166.428.000,-	95,80	
		- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	82 Orang	82 Orang		31.826.025,-	31.800.000,-	99,92	
		- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	82 BUMDes	82 BUMDes		27.278.000,-	27.210.000,-	99,75	
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan		800.100.000,-	782.867.581,-	97,85			
		6. Program Pemberdayaan Lembaga	80%	100%	100%	214.848.350,-	187.576.600,-	87,31	Efisiensi

		Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten /Kota	2 Keg.	2 Keg.		214.848.350,-	187.576.600,-	87,31	
		- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	2 Keg.		214.848.350,-	187.576.600,-	87,31	

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Simpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sasaran Kinerja beserta Program dan Kegiatan menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, 7 (tujuh) Program dan 8 (delapan) Kegiatan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan pada Tahun 2022, telah dilaksanakan seluruhnya atau 100% dilaksanakan. Berdasarkan capaian kinerja di masing-masing Bidang, maka rata-rata pencapaian kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022 adalah mencapai 100%.

4.2 Saran

Dari Capaian Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022, telah menunjukkan hasil yang baik dengan dicapainya kinerja yang baik dari sasaran-sasaran dan indikator-indikator yang ada. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat capaian kinerja yang harus ditingkatkan.

Hal-hal yang harus lebih ditingkatkan lagi dan perlu mendapat perhatian adalah :

1. Peningkatan Koordinasi baik antar bidang yang ada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo maupun Lintas Sektor yang ada di Kabupaten Boalemo.
2. Peningkatan kualitas perencanaan, sehingga diharapkan dengan perencanaan yang baik akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
3. Mengefisiensikan anggaran yang ada, agar dengan anggaran yang tersedia dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

4. Perumusan indikator (output dan outcome) yang lebih tajam lagi, sehingga capaian kinerja dapat terukur dengan baik.
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi program dari masing-masing bidang sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Demikian **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022 ini disampaikan untuk menjadi bahan penilaian dari kinerja yang ditunjukkan oleh pimpinan.